



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR || TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : Bawa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguaan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 - 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

didalamnya ...

dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.

5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2019-2024.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setiap tahun.
 - b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengebangunan di Kabupaten Ende.
 - d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2026 memuat dan kebijakan serta program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Sistematika Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 6

Sistematika Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan semua personil aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

- (1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala DPMD untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala DPMD diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.

(3) Kepala ...

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2024.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

BAB II PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan ...

(3) Kepala DPMD menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada semua, Pejabat Administrator dan Pelaksana lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

**Bagian Kesatu
Pengendalian**

Pasal 9

- (1) Kepala DPMD melalui masing-masing Pejabat Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Administrator lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala DPMD melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

**Bagian Kedua
Evaluasi**

Pasal ...

Pasal 11

- (1) Kepala D P M D melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program DPMD; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Dinas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian Ketiga Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Rensra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal...

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

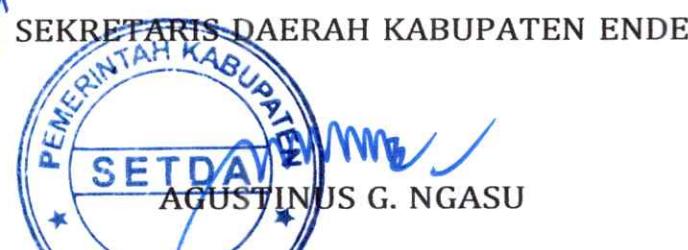
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 25 Maret 2024



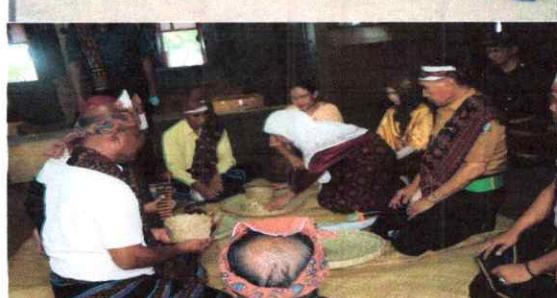
Diundangkan di Ende
pada tanggal 26 Maret 2024



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR ||



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE



RENCANA STRATEGIS

2025-2026

(RENSTRA)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyelenggaraanNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Stratgis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2026 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 -2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024, serta Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026 maka telah disusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) dengan mengacu pada RPJMD.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende merupakan Dokumen teknis perencanaan 2 (Dua) tahunan yang memuat Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegitan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Diharapkan Renstra tersebut dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dan desa serta mempercepat penurunan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sekaligus juga sebagai indikator kinerja yang akan dinilai pada akhir tahun anggaran selama 2 (dua) tahun.

Kami sadar bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari yang diharapkan, sehingga usul saran dan kritikan yang membangun kami harapkan, guna penyempurnaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende ke depan.

Ende,

2024

 An. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Ende
Sekretaris,


CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE, ST
PEMBINA TK. I
NIP. 19721126 199903 2 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten /Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonomi baru.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende menyusun Pedoman Pelaksanaan kegiatan 2 tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 sebagai dokumen antara setelah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara

- Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 ahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 ahun 2014;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 8. Undung- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Desa dan PDT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 296);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031.
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Ende
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende 2019 – 2024.
24. Peraturan Bupati Ende Nomor. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende;
25. Peraturan Bupati Ende Nomor ... Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam rangka pencapaian program Pemerintah Kabupaten Ende. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra akan digunakan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terutama level pimpinan sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan periode 2025 – 2026 dan didalamnya tertuang kebijakan – kebijakan yang perlu ditempuh sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah :

- a. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende setiap tahun.
- b. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RENSTRA dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sekaligus juga sebagai pedoman dalam memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut diatas.
- f. Sebagai acuan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 - 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMD KABUPATEN ENDE

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende
- 4.2. Cascading Kinerja

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANBAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

2. 1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMD

2.1.1 Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 6, serta Peraturan Bupati Ende Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2.1.2 Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas ;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Ende Nomor

47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas;
- b) Penyusunan rencana program dan anggaran;
- c) Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendeharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- d) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Susunan Organisasi sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional

1) *Sub Bagian Umum dan kepegawaian*

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan persuratan;
- b) Pengelolaan dokumen dan kearsipan;
- c) Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- d) Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- e) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
- f) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan

- g) Pengelolaan kehumasan.

2) Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi anggaran dan pembukuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan;
- b) Penatausahaan, verifikasi anggaran, akuntansi dan pembukuan keuangan;
- c) Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- d) Penyiapan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai;
- e) Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
- f) Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

3.) Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Koordinator Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan Koordinasi, Penyusunan Program dan Anggaran, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, melaksanakan penyiapan pelaporan kinerja, melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

b. Bidang terdiri atas :

- 1) Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong Masyarakat Desa
- 2) Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa
- 4) Bidang Pemerintahan Desa.

1. Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong

Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, monitoring serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dasar, kesejahteraan sosial masyarakat desa, pengembangan nilai tradisi adat dan budaya gotong royong dalam pengelolaan media informasi bagi masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Bidang Pelayanan Sosial Dasar, Tradisi dan Gotong Royong menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses informasi masyarakat;
- b) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses informasi masyarakat;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses informasi masyarakat;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses informasi masyarakat;
- e) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan pelayanan dasar, kesejahteraan masyarakat, adat dan budaya, perlindungan sosial serta pengembangan akses informasi masyarakat;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sub Koordinator Substansi Pelayanan Dasar dan Pengembangan Akses Informasi Masyarakat.
Sub Koordinator Substansi Pelayanan Dasar dan Pengembangan Akses Informasi Masyarakat mempunyai tugas menyusun kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan

Supervisi, serta Monitoring dan evaluasi di Bidang Pengelolaan Pelayanan Sosial Dasar dan Penyediaan Bahan Media Akses Informasi Bagi Masyarakat Desa.

2. Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat.

Sub Koordinator Substansi Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas Menyusun Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Perlindungan Sosial Dasar dan Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa.

3. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Tradisi Adat dan Budaya Gotong Royong Masyarakat.

Sub Koordinator Substansi Pengembangan Tradisi Adat dan Budaya Gotong Royong Masyarakat mempunyai tugas Menyusun Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Pengembangan Tradisi Adat dan Budaya Gotong Royong Masyarakat Desa.

2. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna.

Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, pendayagunaan pengelolaan sumber daya hutan, pertanian, pertambangan, sumber daya air, pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a) Memverifikasi dan mengkoordinasikan penyiapan perumusan bahan kebijakan di bidang pembinaan kelembagaan Badan

Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, penayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;

- b) Memimpin, mengkoordinasikan, mempromosikan dan memverifikasi penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, penayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
- c) Memverifikasi dan mengevaluasi penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, penayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
- d) Memimpin pemberi bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, penayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
- e) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, penayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;

- f) Memimpin pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di bidang pembinaan pengelolaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa, perdagangan desa, permodalan usaha ekonomi masyarakat desa, sarana prasarana pendukung ekonomi desa, pendayagunaan pengelolaan sumber daya air, pertanahan, maritim, lingkungan hidup dan teknologi tepat guna;
- g) Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kelembagaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas Melaksanakan Penyiapan dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan Pelaksanaan Kelembagaan Bum Desa.
2. Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan.
Sub Koordinator Substansi Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perdesaan mempunyai tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan Sarana Prasarana Perdesaan.
3. Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
Sub Koordinator Substansi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Perdesaan mempunyai tugas Melaksanakan Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air, dan Pertanahan, Fasilitasi Pendayagunaan Sumber Daya Pesisir dan Kelautan, dan Fasilitasi Rehabilitasi Lingkungan Hidup Desa.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa mempunyai tugas memverifikasi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengembangan kapasitas masyarakat desa, pengelolaan perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat desa, advokasi peraturan desa serta kerja sama antar desa dan kemitraaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengkoordinasikan dan memverifikasi bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan pedesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- b) Memverifikasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- c) Memimpin pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan;
- e) Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan fasilitasi pembelajaran masyarakat desa;
- f) Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi

- bina pengelolaan pendampingan dan kaderisasi masyarakat desa;
- g) Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan perencanaan dan pembangunan partisipatif;
 - h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa.
Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi, serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Pengembangan Kapasitas dan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa, Pengelolaan Fasilitasi Advokasi Hukum, Pengelolaan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengelolaan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengelolaan Pendampingan dan Kaderisasi Masyarakat Desa dan Pengelolaan Fasilitasi Pembelajaran Masyarakat Desa.
- 2. Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa.
Sub Koordinator Substansi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif, Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat aserta Penyiapan Bahan Pemantapan Data Profil Desa sesuai Prosedur dan Ketentuan yang berlaku.
- 3. Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa.

Sub Koordinator Substansi Advokasi Peraturan Desa, Kerja Sama dan Kemitraan Masyarakat Desa mempunyai tugas Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Bina Pengelolaan Fasilitasi Kemitraan, Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

4. Bidang Pemerintahan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memverifikasi penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang penamaan dan kode desa, evaluasi perkembangan desa, fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa dan BPD, fasilitasi penataan dan administrasi pemerintahan desa, keuangan dan aset pemerintahan desa, peraturan desa, kelembagaan desa dan kerja sama desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengkoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan fasilitasi tata wilayah desa, penamaan dan kode desa, penataan kewenangan desa, urusan pemerintahan, produk hukum desa dan administrasi pemerintahan desa;
- b) Memverifikasi penyiapan dan pelaksanaan penyusunan norma standar, prosedur, pembinaan umum, bimbingan teknis, supervisi pemantau, evaluasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur desa;
- c) Mengkoordinasikan verifikasi penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, melaksanakan pembinaan umum, perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa, pelaksanaan fasilitasi teknis musyawarah desa dan kerja sama pemerintahan desa;
- d) Mengkoordinasikan verifikasi bahan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur,

- monitoring, evaluasi dan pelaporan keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
- e) Memimpin pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi keuangan desa, sumber pendapatan desa, transfer dana desa, pengelolaan aset desa dan sistem informasi keuangan dan aset desa;
 - f) Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan standar, prosedur dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan desa kelurahan;
 - g) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi perkembangan desa, penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan advokasi kewenangan dan peraturan desa;
 - h) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi bina pengelolaan analisis dan penyusunan peraturan desa.

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa.
Sub Koordinator Substansi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa, Penataan Desa dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan dan Kerja Sama Desa.
Sub Koordinator Subsatansi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas menyusun Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan,

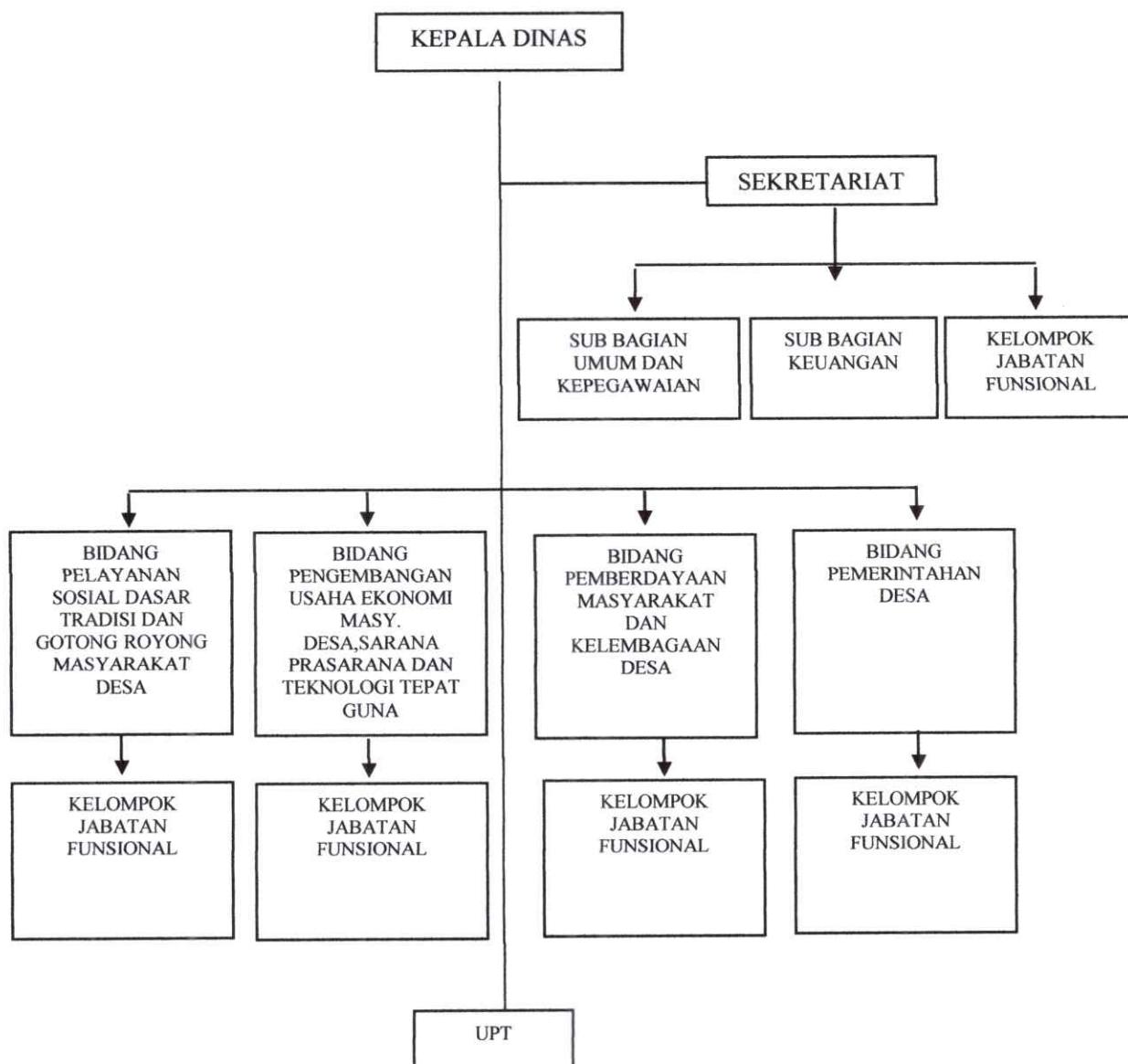
Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelembagaan dan Kerja Sama Desa.

3. Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa.

Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa mempunyai tugas Menyusun Bahan Kebijakan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Standarisasi, Bimbingan Teknis dan Supervisi serta Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Keuangan Desa dan Aset Desa.

Untuk mengetahui struktur Organisasi DPMD Kabupaten Ende, dapat dilihat pada halaman berikut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPETEN ENDE



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Kepegawaian)

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah 1 (satu) orang eselon II, 5 (lima) orang eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang, serta 15 (lima belas) orang eselon IV terdiri dari 2 orang Kepala Sub Bagian dan 13 orang Pejabat Fungsional. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga didukung oleh 9 orang staf fungsional umum selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Jabatan	Keterangan		
				Defenitif	PLT	Lowong
1.	Kepala Dinas	II-b	-	-	-	-
2.	Sekretaris	III-a	1	1	-	-
3.	Kepala Bidang	III-b	4	4	-	-
4.	Kepala Sub Bagian	IV-a	2	2	-	-
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	IV-a	13	12	-	-
	Jumlah		20	19	-	-

Sumber data kepegawaian Januari 2024

Komposisi pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende berdasarkan tingkat pendidikan : pasca sarjana (S2) 3 orang, sarjana (S1) 19 orang, Diploma (D3) 3 orang, dan yang berpendidikan SLTA sebanyak 5 orang seperti tertera pada tabel 2.2

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	2 orang
2.	Strata 1 (S1)	19 orang
3.	Sarjana Muda (D3)	3 orang
4.	SLTA	5 orang
	Jumlah	29 orang

Sumber data kepegawaian Januari 2024

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan : Pembina Utama Muda (IV-c) 1 orang, Pembina Tk. I (IV-b) 1 orang Pembina (IV-a) 4 orang, Penata Tingkat I (III-d) 11 orang, Penata (III-c) 2 orang, Penata Muda Tingkat I (III-b) 5 orang, Penata Muda (III-a) 4 orang, Pengatur Tk I (II-d) 1 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2 orang untuk mendukung peningkatan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dibantu Tenaga Honorer 2 orang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3. Komposisi Pegawai menurut Pangkat/ Golongan

No	Pangkat/ Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV-c)	1 orang
2.	Pembina Tingkat I (IV-b)	1 orang
3.	Pembina (IV-a)	4 orang
4.	Penata Tingkat I (III-d)	11 orang
5.	Penata (III-c)	2 orang
6.	Penata Muda Tk. I (III-b)	5 orang
7.	Penata Muda (III-a)	4 orang
8.	Pengatur Tingkat I (II-d)	1 orang
9.	Pengatur (II-c)	--
10.	Pengatur Muda tingkat I (II-b)	--
11.	Pengatur muda (II-a)	--
12	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)	2 orang
13	Tenaga Honor	2 orang
	Jumlah	33 orang

Sumber data kepegawaian Januari 2024

2.2.2. Sumber Daya Pendukung (Sarana Prasarana)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 2 (dua) tahun kedepan perlu dilakukan pemeliharaan, perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan Sarana dan Prasarana perkantoran antara lain Pembangunan Gedung kantor, pengadaan alat angkut / kendaraan dinas, dan pengadaan barang inventaris kantor / rumah tangga, alat studio / komunikasi.

Sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Data Sarana-prasarana DPMD Kabupaten Ende

No	Jenis Sarana Prasarana	Luas/Jumlah	Keterangan
1	Luas tanah ±	1500 m ²	
2	Gedung 2 unit (gedung kantor ± 300 m ² dan gedung ruang Praktek TTG	612 m ²	2 lantai
3	Kendaraan roda empat (Daihatsu Hiline)	1 Unit	Kondisi Rusak
4	Kendaraan Roda dua	15 Unit	Kondisi 5 baik, 10 buah rusak berat
5	Meja kerja, Meja Rapat	65 buah	Kondisi baik
6	Lemari dan rak arsip/Filing kabinet	38 Unit	Kondisi baik
7	Kursi	43 buah	Kondisi baik
8	White board	2 buah	Kondisi baik
9	Papan Pengumuman	14 buah	Kondisi baik
10	Pesawat telepon dan Faximile	1 Unit	Kondisi baik
11	Komputer Desktop	8 unit	Kondisi baik
12	AC	2 Unit	Kondisi baik
13	Televisi	1 buah	Kondisi baik
14	Wireless	2 Unit	Kondisi baik
15	Microphone	4 buah	Kondisi baik
16	Hard disk	1 buah	Kondisi baik
17	Layar Film	1 buah	Kondisi baik
18	Printer	20 buah	Kondisi baik
19	Laptop	27 buah	Kondisi baik

Sumber : DPMD Kab. Ende Tahun 2023

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende

Untuk mengetahui kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada Capaian Sasaran

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende periode 2019 - 2024. Capaian target IKK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ende Tahun 2019 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kemandirian Desa				2	2	2	2	2					
1.	Meningkatnya Keberdayaan Lembaga Ekonomi	-	-	-	20 %	40 %	60%	80 %	100 %	100%	50%	-	-	-
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	19,76 %	39,52 %	59,68%	79,84%	100%	82,05%	86,03%	-	-	-
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa	-	-	-	20 %	40 %	60%	80 %	100 %	100%	100%	-	-	-
4.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	-	-	-	20 %	40 %	60%	80 %	100 %	100%	87,5%	-	-	-
5.	Meningkatnya Peran Perempuan dipedesaan	-	-	-	20 %	40 %	60%	80 %	100 %	100%	100%	-	-	-

Keterangan : Tabel ini sesuai dengan Renstra 2019 – 2024 (Renstra Awal)

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke				Realisasi Capaian Tahun Ke			
					2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Desa Membangun (IDM) : 1.Desa Sangat tertinggal 2. Desa Tertinggal, 3 Desa Berkembang 4. Desa Maju	-	-	-	-	1.4, 2. 168, 3.77, 4. 6 Desa	1.2, 2. 172, 3.83, 4. 7 Desa	1.0, 2. 172, 3.84, 4. 8 Desa		1.2, 2. 105, 3.143, 4. 2 Desa	1.0, 2. 113, 3.133, 4. 9 Desa	-
2.	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	-	-	-	-	19,61%	23,53%	27,45%		100%	-	-
3.	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif	-	-	-	-	8,63%	9,80%	11,37%		77,33%		-
4.	Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	CC nilai	B nilai	B nilai		B	-	-

Dari table pencapaian pelayanan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pesentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik

Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah penyelesaian dokumen administrasi dari desa setiap tahun. Perkembangan pencapaian persentase dokumen administrasi di desa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukan bahwa tingkat Sumber daya manusia di desa / kelurahan sudah semakin meningkat dan sarana prasarana mendukung.

b. Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang Aktif.

Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan pengawasan pembangunan yang baik dalam tiap tahun perkembangan pencapaian persentase desa / kelurahan yang pengawasan dengan baik dari tahun ke tahun, hal ini menunjukan pembangunan yang ada di desa / kelurahan sudah banyak yang sesuai dengan rencana pembangunan di desa / kelurahan.

c. Persentase Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa

Indikator ini menunjukan perbandingan jumlah desa / kelurahan yang sudah terbentuk Bumdes dengan jumlah desa secara keseluruhan, hal ini menunjukan perkembangan persentase desa yang memiliki Bumdes semakin meningkat dalam tiap tahunnya. Informasi tentang Bumdes sudah sangat baik karena di desa sudah memiliki jaringan internet desa.

Tabel 2.6.

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga diukur melalui kinerja realisasi anggaran dan pendanaan pembangunan sebagaimana tertera pada table dibawah ini : (Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Tidak Langsung	2.000.560.326	2.395.350.233	2.096.000.000	2.044.000.000	2.096.000.000	1.989.667.973	2.317.543.370				99,45	96,8			
Belanja Barang dan Jasa	1.987.330.000	2.251.350.000	2.302.810.500	2.377.444.814	2.427.491.840	1.761.452.000	1.199.405.999				88,63	53,3			
Belanja Modal	97.706.000	32.115.002	10.000.000	10.000.000	28.826.322	88.567.000	32.000.000				90,65	99,6			
Total	4.085.596.326	5.478.700.233	4.408.810.500	4.421.444.814	4.552.318.162	3.839.686.973	3.548.949.369				93,98	75,85			

Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Belanja Pegawai	2.395.350.233	2.533.068.842	2.190.955.607	2.096.000.000	2.317.543.370	2.391.686.656	2.167.467.707		96,8	94,4	98,9	
Belanja Barang dan Jasa	1.260.219.361	4.171.874.525	1.378.580.770	2.106.400.000	1.231.405.999	2.420.175.652	1.342.562.230		97,7	58	97,38	
Total	3.655.569.594	6.704.943.367	3.569.536.377	4.202.400.000	3.548.949.369	4.811.862.308	3.510.029.937		97,1	71,8	98,33	

Dari table anggaran dan realisasi pendanaan digambarkan bahwa rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2023 dapat dikatakan baik karena rata-rata rasio diatas 80.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Seiring dengan makin berkembangnya, masyarakat menjadi makin kritis dan cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat menjadi kritis dan cerdas. Tuntutan dan harapan dari masyarakat yang harus menjawab oleh pemerintah Daerah makin tinggi dan beragam. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai bagian dan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende berkewajiban untuk menjawab sebagian harapan dan tuntutan dari masyarakat tersebut yang tentu saja disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi serta kekuatan sumber daya yang ada.

Disamping memiliki kekuatan dan kelemahan secara internal, dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende juga memiliki tantangan dan peluang.

Tantangan :

1. Perkembangan kemajuan Teknologi informasi tidak diimbangi dengan persiapan sumber daya manusia yang ada di desa;
2. Perubahan iklim yang tidak pasti sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan kurang berperan dalam mendorong nilai – nilai gotong royong;
4. Pembangunan di desa belum berbasis produk unggulan desa;
5. Kinerja Pelayanan Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal.

Peluang :

1. Ruang pendanaan melalui Dana Desa untuk penyertaan Modal dan Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Pedesaan.
2. Adanya kerjasama dengan Lembaga – lembaga Donor/NGO baik lokal, Nasional dan Internasional;
3. Adanya dukungan Lembaga Adat untuk mendorong percepatan pembangunan;
4. Bantuan keuangan melalui BLT dan PKH;
5. Perkembangan Teknologi informasi khususnya Akses internet sudah masuk ke desa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan.

Keberadaan suatu organisasi tidak dapat dilepas dari perubahan yang terjadi pada lingkungan dimana organisasi tersebut berada, baik lingkungan internal maupun eksternal. Demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya untuk melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh sebab itu, dalam menyusun perencanaan strategis adalah suatu kelaziman untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan yang ada.

Kekuatan sebuah dokumen perencanaan strategis terletak pada tingkat fleksibilitas substansi rencana terhadap dinamika perkembangan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam kurun waktu kebijakan dan program organisasi / institusi yang telah direncanakan, akan tetapi kemampuan adaptasi kebijakan dan program tersebut terhadap perkembangan kondisi yang terjadi secara internal maupun eksternal. Dari evaluasi pelaksanaan tugas terdapat permasalahan dibawah ini.

1. Rencana Program, Kegiatan tidak didukung dengan Anggaran yang memadai
2. Terbatasnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Sarana / Prasarana Kantor dan Pendukung pelayanan di kantor kurang memadai.
4. Sumber Daya Manusia khusus Staf di bidang masih kurang
5. Pengelolaan BUMDes belum dilakukan secara Optimal karena Perda tentang Pengelolaan BUMDes belum disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
6. Belum Optimalnya pemahaman dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian Desa.
7. Belum semua Desa memiliki Peta Digital.
8. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa belum maksimal.
9. Perencanaan dan Penganggaran Desa belum tepat waktu
11. Peran BPD sebagai mitra Pemerintah Desa belum maksimal.

Permasalahan yang disampaikan diatas dapat dilakukan intervensi yang tepat melalui perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang mempunyai fokus dan lokus yang jelas sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

3.2 Isu Strategis

Sesuai dengan Program Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2029 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk mendukung Program Pemerintah serta memperhatikan permasalahan utama yang ada di Desa antara lain :

1. Lembaga Kemasyarakatan tingkat desa kurang memahami tugas dan fungsi dan belum berperan secara aktif.
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya aparatur pemerintah Desa sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa belum berjalan dengan baik
3. Pengelolaan potensi unggulan Desa khususnya Pariwisata, kelautan, Pertanian dan Perkebunan belum maksimal.
4. Tata kelola pemerintahan desa yang berbasis digital.
5. Kualitas musyawarah desa yang masih rendah.
6. Kewenangan Desa belum dilaksanakan dengan baik sehingga berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan desa.
7. Belum optimalnya pendayagunaan manusia dan alam dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Pemberdayaan BUMDes yang profitable dan berkelanjutan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2026 yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan pembangunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Ende.

4.1. TUJUAN

Tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah adalah ” **Meningkatnya Kemandirian Desa** ” dengan Indikator Kinerjanya adalah *Indeks Desa Membangun (IDM)* target Nilai Indeks kondisi Akhir tahun 2026 adalah 0,6461.

5.2. Sasaran

Sasaran jangka menengah periode 2025 –2026 yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
3. Meningkatnya Desa yang Naik Kelas
4. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 beserta indicator kinerjanya secara lengkap disajikan pada table berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran pada Tahun ke	
				2025	2026
1	Meningkatnya Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	0,6255	0,6461
			Desa Mandiri	-	-
			Desa Maju	7	8
			Desa Berkembang	105	105
			Desa Tertinggal	143	142
			Desa Sangat Tertinggal		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP DPMD	B
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	19,61
			Meningkatnya Desa yang Naik Kelas	Persentase Desa yang Naik Kelas	18,32
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang aktif	73,56	75,18

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2026, selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none">• Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi masyarakat perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi perdesaan• Penyelenggaraan Penataan Desa• Penguatan Kapasitas aparatur pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa• Penguatan Kapasitas pengelolaan keuangan desa• Penguatan Kapasitas Pelaku perencanaan pembangunan dan evaluasi desa
	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat sebagai penggerak pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none">• Optimasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam Posyandu, PKK, KPM,• Memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan

		masyarakat	swadaya dan partisipasi masyarakat (RT, RW, LPM, dan Karang Taruna)
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi • Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan 	

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, untuk mencapai Tujuan dan Sasaran diperlukan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan menjawabi Sasaran yang ditargetkan. Program dan Kegiatan yang menjadi tolok ukur keberhasilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende pada Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, maka secara keseluruhan program dan kegiatan dapat dipaparkan sebagai berikut :

Tabel VI. 1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ENDE

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	DATA AWAL	TARGET			PERANGKAT DAERAH	Kerangka Pendanaan Tahun	
						2024	2025	2026		2025	2026
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Program Penataan Desa	Persentase Penataan Desa	Jumlah Desa yang terealisasi penataan desa/Jumlah Desa yang diusulkan untuk dilakukan penataan desa dikali 100%	Persen		100%	100%	100%	DPMD	1.250.000.000	1.305.000.000
2.13.02.2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa	Terselenggaranya Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang terealisasi penataan desa/Jumlah Desa yang diusulkan untuk dilakukan penataan desa dikali 100%	Desa	-	9	5	5	DPMD	1.250.000.000	1.305.000.000
2.13.02.2.01.01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100%	Desa	-	9	5	5	DPMD	900.000.000	900.000.000
2.13.02.2.01.03 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100%	Desa	-	9	5	5	DPMD	150.000.000	150.000.000
2.13.02.2.01.04 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100 %	Desa	-	9	5	5	DPMD	100.000.000	150.000.000
2.13.02.2.01.06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	-	1	1	1	DPMD	100.000.000	105.000.000
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Penyelenggaraan Program Peningkatan Kerja Sama Pedesaan	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan	Jumlah Desa yang didampingi dibagi seluruh desa yang melakukan kerjasama dikali 100%	Persen	100%	100%	100%	100%		100.000.000	103.000.000
2.13.03.2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan	Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Desa	2	3	4	5		150.000.000	155.000.000
2.13.03.2.01.01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Dokumen	2	3	4	5	DPMD	150.000.000	155.000.000

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Program Administrasi Pemerintahan Desa	1. Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikali 100%	%	100	100	100	100	DPMD	150.000.000	155.000.000
		2. Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES	Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang sudah penyerataan Modal dikali 100%	%	7,27	9,09	10,91	12,73	DPMD	300.000.000	310.000.000
2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanaanya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Cakupan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi	Jumlah Desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikali 100%	%	100	100	100	100	DPMD	150.000.000	155.000.000
		2. Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES	Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang sudah Penyertaan Modal dikali 100%	%	7,27	9,09	10,91	12,73	DPMD	300.000.000	310.000.000
2.13.04.2.01.01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksanaanya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dibagi jumlah desa dikali 100%	Dokumen	8160	160	160	160	DPMD	7.000.000	10.000.000
2.13.04.2.01.02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksanaanya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Dokumen	1275	783	851	792	DPMD	9.000.000	10.000.000
2.13.04.2.01.03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksanaanya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Dokumen	510	255	255	255	DPMD	8.000.000	10.000.000
2.13.04.2.01.04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksanaanya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Dokumen	255	255	255	255	DPMD	10.000.000	11.600.000
2.13.04.2.01.05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksanaanya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	100	50	100	150	DPMD	7.000.000	10.000.000
2.13.04.2.01.06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksanaanya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Laporan	255	255	255	255	DPMD	7.000.000	10.400.000
2.13.04.2.01.07 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksanaanya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Dokumen	765	774	861	792	DPMD	10.000.000	9.000.000

2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dibagi Jumlah BUMDes yang dibentuk dikali 100%	Dokumen	31	10	15	20	DPMD	200.000.000	200.000.000
2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dibagi Jumlah yang direncanakan X 100%	Laporan		8	167	10	DPMD	47.000.000	30.000.000
2.13.04.2.01.10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dibagi Jumlah Desa yang direncanakan X 100%	Laporan		5	5	5	DPMD	7.000.000	7.000.000
2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen		5	10	15	DPMD	8.000.000	10.000.000
2.13.04.2.01.13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	20	5	10	15	DPMD	100.000.000	110.000.000
2.13.04.2.01.14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	100	30	40	50	DPMD	6.000.000	7.000.000
2.13.04.2.01.15 Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100%	Desa	-	9	5	5	DPMD	6.000.000	8.000.000
2.13.04.2.01.16 Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Laporan	100	10	10	10	DPMD	6.000.000	8.000.000
2.13.04.2.01.17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	-	2	4	6	DPMD	7.000.000	9.000.000
2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Dokumen	-	2	2	2	DPMD	5.000.000	5.000.000

2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dikali 100%	Persen	67,46	68,81	70,16	71,51	DPMD	500.000.000	520.000.000
2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dikali 100%	Persen	67,46	68,81	70,16	71,51	DPMD	500.000.000	520.000.000
2.13.05.2.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	-	3	7	12	DPMD	30.000.000	40.000.000
2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 100 %	Dokumen	10	14	18	22	DPMD	190.000.000	200.000.000
2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 100%	Lembaga	100	120	130	145	DPMD	40.000.000	40.000.000
2.13.05.2.01.04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di kali 100 %	Unit	-	1	1	1	DPMD	40.000.000	30.000.000
2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dibagi Jumlah Desa X 100%	Laporan	-	1	2	3	DPMD	30.000.000	30.000.000

2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	8	10	12	14	DPMD	20.000.000	30.000.000
2.13.05.2.01.09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dibagi Total Jumlah PKK dikali 100 %	Dokumen	100	50	100	150	DPMD	150.000.000	150.000.000
2.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	2.904.248.323	2.950.131.545
2.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	meningkatnya Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	115.000.000	115.000.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Dokumen		3	2	2	DPMD	10.000.000	10.000.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersedia	Dokumen		1	2	2	DPMD	10.000.000	10.000.000
7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersedia	Dokumen		1	2	2	DPMD	10.000.000	10.000.000
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	Dokumen		1	2	2	DPMD	10.000.000	10.000.000
7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersedia	Dokumen		1	2	2	DPMD	10.000.000	10.000.000
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		7	7	7	DPMD	15.000.000	15.000.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang tersedia	Laporan		1	1	1	DPMD	50.000.000	50.000.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%						DPMD	2.087.248.323	2.143.531.545
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan		32 orang / 14 Bulan	32 orang / 14 Bulan	32 orang / 14 Bulan	DPMD	2.051.248.323	2.110.531.545
7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Dokumen		11	11	11	DPMD	20.000.000	15.000.000
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen		5	2	5	DPMD	1.000.000	3.000.000
7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Tahun n)	Laporan		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Tersedianya Keuangan Bulanan/triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan / Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester	Laporan		26	16	16	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	25.000.000	23.600.000
7.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penjaga Malam	Dokumen		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		2	2	2	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan		12	12	12	DPMD	5.000.000	3.600.000

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	30.000.000	25.000.000
7.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya mesin absensi	Unit		-	1	-	DPMD	5.000.000	-
7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawai	Dokumen		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		2	2	2	DPMD	10.000.000	5.000.000
7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		2	2	2	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Orang		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	121.000.000	141.000.000
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		12	8	8	DPMD	10.000.000	10.000.000
7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		10	5	5	DPMD	10.000.000	20.000.000
7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		5	3	3	DPMD	10.000.000	20.000.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket		20	20	20	DPMD	20.000.000	20.000.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket		10	10	10	DPMD	20.000.000	20.000.000
7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undanagan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undanagan yang disediakan	Dokumen		12	12	12	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket		4	2	2	DPMD	5.000.000	5.000.000

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		2	2	2	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		3	3	3	DPMD	30.000.000	30.000.000
7.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Dokumen		1	1	1	DPMD	3.000.000	3.000.000
7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		1	1	1	DPMD	3.000.000	3.000.000
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	420.000.000	410.000.000
7.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Unit		-	1	-	DPMD	180.000.000	20.000.000
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		-	2	1	DPMD	50.000.000	200.000.000
7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit		-	6	6	DPMD	50.000.000	50.000.000
7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit		-	3	3	DPMD	50.000.000	50.000.000
7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		-	1	1	DPMD	50.000.000	50.000.000
7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		-	1	1	DPMD	25.000.000	25.000.000
7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit		-	1	1	DPMD	15.000.000	15.000.000
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	56.000.000	56.000.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		12	12	12	DPMD	3.000.000	3.000.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan		5/12	5/12	5/12	DPMD	30.000.000	30.000.000
7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan		1	1	1	DPMD	3.000.000	3.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan		2	2	2	DPMD	20.000.000	20.000.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen		100	100	100	DPMD	50.000.000	36.000.000
7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		1	1	1	DPMD	25.000.000	10.000.000
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	unit		3	3	3	DPMD	4.000.000	5.000.000
7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit		1	2	2	DPMD	3.000.000	3.000.000
7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit		1	1	1	DPMD	10.000.000	10.000.000
7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit		1	1	1	DPMD	5.000.000	5.000.000
7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		1	1	1	DPMD	3.000.000	3.000.000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026 disajikan dalam tabel 7.1

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja DPMD Kabupaten Ende
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD tahun 2022	Target Capaian Setiap Tahun		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode 2026
			2025	2026	
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,5917	0,6255	0,6461	0,6461
	- Desa Mandiri				
	- Desa Maju	5	7	8	8
	- Desa Berkembang	105	105	105	105
	- Desa Tertinggal	143	143	142	142
	- Desa Sangat Tertinggal	2			

BAB VIII

PENUTUP

Pada BAB VIII ini sebagai BAB penutup dapat dikatakan bahwa Rencana Strategis Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026 setelah dipresentasikan, diasistensi dan ditetapkan, akan berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam mencapai tujuan dan sasaran kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara pada DPMD kabupaten Ende bersama para Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, Lurah, dan masyarakat desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende tahun 2025 - 2026.

Untuk mencapai Rencana Strategis ini diperlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara pada DPMD, seluruh OPD pada level Kabupaten Ende, Kecamatan, Kelurahan dan Pemerintah Desa serta Lembaga Donor/NGO dengan dukungan partisipasi aktif masyarakat desa dan kelurahan.

Akhirnya Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 ini, kiranya mendapat dukungan dari Pimpinan Eksekutif dan Legislatif serta Lembaga Donor/NGO dalam pelaksanaanya guna mewujudkan karakter Kabupaten Ende menuju masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan melalui 3 fase pemberdayaan yaitu: penyiapan masyarakat (pra kegiatan), pelaksanaan kegiatan dan pasca kegiatan yang dapat dilihat dari kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan, memelihara, dan melanjutkan hasil pembangunan desa dan kelurahan.

Ende, 2024

 An. Kepala DPMD Kabupaten Ende
Sekretaris,


CHRISTIANA FARIDA MUDA MITE ST
PEMBINA TK. I
NIP. 19721126 199903 2 077

Lampiran I : Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan dan Program DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategis	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
						Kebijakan	Program			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun IDM): 1.Desa Sangat Tertinggal, 2. Desa Tertinggal, 3.Desa Berkembang 4.Desa Maju	1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Nilai AKIP DPMD	Peningkatan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rendahnya kinerja pegawai dalam perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi	Rendahnya Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana	- Rendahnya Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana - Masih ada yang berjasa SLTA - Terbatasnya Anggaran - Sarana dan Prasarana Kurang memadai
			2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Peningkatan Kapasitas dan Tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rendahnya SDM Aparatur Pemerintahan Desa	Terlambatnya realisasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat	- Rendahnya kualitas SDM aparatur Pemerintahan Desa (BPD dan Aparat Desa) - Pergantian Aparat Desa tidak sesuai dengan amanat regulasi - Terlambatnya penetapan Perdes RKP Desa - Terlambatnya penetapan Perdes APB Desa - Terlambatnya penetapan Perdes LKPJ Desa
			3. Meningkatnya Desa yang Naik Kelas							
			3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat	Peningkatan Kapasitas lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat	Optimalisasi Kader Pemberdayaan desa yang bergabung dalam Posyandu, PKK dan KPM Memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rendahnya partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pembangunan Desa	Rendahnya Peran dan Fungsi Lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban	Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan SDM Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat tentang regulasi dan tata kelola pemerintah Desa

Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

NO	PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Indikator (Output)	Kelompok Sasaran			
				2024	2025	2026
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun		2.718.600.000	2.917.000.000	3.483.600.000
	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		115.000.000	115.000.000	115.000.000
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor DPMD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Kantor DPMD	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor DPMD	2.136.000.000	2.084.000.000	2.136.000.000
2	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor DPMD	2.096.000.000	2.044.000.000	2.096.000.000
	2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kantor DPMD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000

3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		23.600.000	25.000.000	23.600.000
	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	4 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor DPMD	3.600.000	5.000.000	3.600.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.000.000	40.000.000	30.000.000
4	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Kantor DPMD	-	10.000.000	-
	2 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	3 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	4 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		160.000.000	160.000.000	160.000.000
5	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kantor DPMD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kantor DPMD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kantor DPMD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kantor DPMD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kantor DPMD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	7 Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000

	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor DPMD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		130.000.000	370.000.000	890.000.000
	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Kantor DPMD	-	180.000.000	200.000.000
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kantor DPMD	25.000.000	50.000.000	50.000.000
	3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kantor DPMD	15.000.000	50.000.000	50.000.000
	4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kantor DPMD	50.000.000	50.000.000	550.000.000
	5	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kantor DPMD	25.000.000	25.000.000	25.000.000
	6	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kantor DPMD	15.000.000	15.000.000	15.000.000
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		56.000.000	56.000.000	56.000.000
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor DPMD	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kantor DPMD	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	3	Penyediaan jasa Peralatan dan Pelengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kantor DPMD	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor DPMD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		68.000.000	67.000.000	73.000.000
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kantor DPMD	10.000.000	25.000.000	10.000.000
9	2	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Kantor DPMD	20.000.000	4.000.000	25.000.000

	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kantor DPMD	20.000.000	20.000.000	20.000.000
	4 Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Kantor DPMD	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	5 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kantor DPMD	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	6 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kantor DPMD	3.000.000	3.000.000	3.000.000
II	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa		1.075.000.000	1.250.000.000	1.305.000.000
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa		1.075.000.000	1.250.000.000	1.305.000.000
1	1 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan dan perubahan status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	5 Desa	775.000.000	900.000.000	900.000.000
2	2 Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya		-	-	-
3	3 Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	5 Desa	100.000.000	150.000.000	150.000.000
4	4 Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	5 Desa	100.000.000	100.000.000	150.000.000
5	5 Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten / Kota		-	-	-
6	6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Desa	100.000.000	100.000.000	105.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan kerja sama Pedesaan		75.000.000	150.000.000	155.000.000
1	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Peningkatan kerja sama Pedesaan		75.000.000	150.000.000	155.000.000
1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten atau Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	5 Dokumen	75.000.000	150.000.000	155.000.000

	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten / Kota				
2				-	-	-
3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		-	-	-
IV	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawartaran Desa yang tertib Administrasi		75.000.000	150.000.000	155.000.000
		Persentase BUMDes berkembang		175.000.000	300.000.000	310.000.000
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawartaran Desa yang tertib Administrasi		75.000.000	150.000.000	155.000.000
		Persentase BUMDes berkembang		175.000.000	300.000.000	310.000.000
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	60 Dokumen	5.000.000	7.000.000	10.000.000
2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	255 Dokumen	5.000.000	9.000.000	10.000.000
3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	255 Dokumen	5.000.000	8.000.000	10.000.000
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan Keuangan Desa	255 Dokumen	5.000.000	10.000.000	11.600.000
5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	5.000.000	7.000.000	10.000.000
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	255 Laporan	5.000.000	7.000.000	10.400.000
7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	255 Dokumen	5.000.000	10.000.000	9.000.000
8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	20 Dokumen	100.000.000	200.000.000	200.000.000
9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	177 Laporan	5.000.000	47.000.000	30.000.000
10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	15 Laporan	5.000.000	7.000.000	7.000.000

	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	255 Dokumen	5.000.000	8.000.000	10.000.000
	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Manajemen Pemerintahan Desa		-	-	-
	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15 Dokumen	75.000.000	100.000.000	110.000.000
	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	150 Orang	5.000.000	6.000.000	7.000.000
	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa	5.000.000	6.000.000	8.000.000
	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	30 Laporan	5.000.000	6.000.000	8.000.000
	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	6 Dokumen	5.000.000	7.000.000	9.000.000
	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	6 Dokumen	5.000.000	5.000.000	5.000.000
V		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat		275.000.000	500.000.000	520.000.000
1		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat		275.000.000	500.000.000	520.000.000
1		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	12 Dokumen	10.000.000	30.000.000	40.000.000
2		Fasilitasi Penataan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	8 Dokumen	65.000.000	190.000.000	200.000.000
3		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Lembaga	35.000.000	40.000.000	40.000.000

4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	25.000.000	40.000.000	30.000.000
6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	20.000.000	30.000.000	30.000.000
7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	4 Laporan	20.000.000	20.000.000	30.000.000
9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	100 Dokumen	100.000.000	150.000.000	150.000.000
Jumlah				4.393.600.000	5.267.000.000	5.928.600.000

Tujuan : Meningkatnya Kemandirian Desa

1. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (output)	Formula Indikator	Satuan	Tahun Dasar		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir periode Renstra
						Formula	Angka				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun			Jumlah Capaian Indikator masing-masing Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen			100	100	100	100
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen			100	100	100	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	Dokumen			2	2	2	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang tersedia	Dokumen			1	1	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang tersedia	Dokumen			1	1	1	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersedia	Dokumen			1	1	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersedia	Dokumen			1	1	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinator Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja yang tersedia	Laporan			7	7	7	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja yang tersedia	Laporan				1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%				100	100	100	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan			30 orang / 14 Bulan	31 orang / 14 Bulan	31 orang / 14 Bulan	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan	Dokumen			11	11	11	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi	Dokumen			5	5	5	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah (Laporan Keuangan Akhir Tahun n)	Laporan			1	1	1	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan,Triwulan dan Semesteran	Laporan			26	26	26	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			1	1	1	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen			100	100	100	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kbutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			1	1	1	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penjaga Malam	orang			1	1	1	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan			1	1	1	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			12	12	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan			12	12	12	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen			100	100	100	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Mesin Absensi	Unit			-	1	1	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen			1	1	1	
		Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			1	1	1	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			2	2	2	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			2	19	2	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan	Kali			1	1	1	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen			100	100	100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket			12	8	8	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket			10	5	5	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket			5	3	3	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket			50	50	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Dokumen			10	10	10	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang disediakan	Surat Kabar / Bulan			12	12	12	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	Paket			4	3	2	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan			2	2	2	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali			3	3	3	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	Kali			1	1	1	
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tahun			1	1	1	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan Dikali 100%	Persen			100	100	100	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang disediakan	Unit			-	1	-	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit			-	-	1	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit			6	6	6	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			9	3	3	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah unit Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			-	-	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit			-	1	1	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen			100	100	100	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kali			12	12	12	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Rekening/Bulan			5/12	5/12	5/12	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	unit			1	1	1	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Orang			2	2	2	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Capaian Indikator masing-masing Sub Kegiatan dibagi dengan Jumlah Total Sub Kegiatan dikali 100%	Persen			100	100	100	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit			1	1	1	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	unit			3	3	3	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit			1	2	2	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit			1	1	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		-%	1	1	1	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit		-%	1	1	1	

2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa

Program	Indikator Program (out come)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	Formula Indikator	Satuan	Tahun Dasar		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Formula	Angka				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan Desa			Jumlah Desa yang terealisasi penataan desa/Jumlah Desa yang diusulkan untuk dilakukan penataan desa dikali 100%	Persen			100	100	100	100
		Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang terealisasi penataan desa/Jumlah Desa yang diusulkan untuk dilakukan penataan desa dikali 100%	Persen			100	100	100	100
		Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100%	Desa			9	5	5	
		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100%	Desa			9	5	5	
		Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100 %	Desa			9	5	5	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit			9	5	5	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan			Jumlah Desa yang didampingi dibagi seluruh desa yang melakukan kerjasama dikali 100%	Persen			100%	100%	100%	100%
		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Pedesaan	Jumlah Desa Yang Melakukan Kerjasama Antar Desa	Persen			100	100	100	100
		Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten / Kota	Dokumen			2	3	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1. Cakupan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi			Jumlah Desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikali 100%	%		100	100	100	100	100
	2. Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES			Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang sudah Penyertaan Modal dikali 100%	%	4/55 x 100%	7,27	7,27	9,09	10,91	10,91
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1. Cakupan pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang tertib administrasi		Jumlah Desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa seluruhnya dikali 100%	%		100	100	100	100	100	100
	2. Persentase BUMDes yang berkontribusi terhadap PADES		Jumlah BUMDes yang sudah berkontribusi ke PADES dibagi Jumlah BUMDes yang sudah Penyertaan Modal dikali 100%	%	4/55 x 100%	7,27	7,27	9,09	10,91	10,91	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dibagi jumlah desa dikali 100%	Dokumen	32 x 255 desa	8160	640	640	640		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Dokumen	5 x 255 desa	1275	783	851	792		
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dibagi Jumlah Desa dilakui 100 %	Dokumen	2 x 255 Desa	510	255	255	255		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Dokumen	1 x 255 Desa	255	255	255	255		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		100	50	100	150		
	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Dokumen	1 x 255 Desa 3 x 255 Desa	765	774	861	792		

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa dibagi Jumlah BUMDes yang dibentuk dikali 100%	Dokumen		31	10	15	20	
		2.13.04.2.01.09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dibagi Jumlah yang direncanakan X 100%	Laporan		8	167	10	177	
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dibagi Jumlah Desa yang direncanakan X 100%	Laporan			5	5	5	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen			115	180	255	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	20	5	10	15	264	
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		50	100	150	150	
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa dibagi Jumlah Desa yang diusulkan dikali 100%	Desa			9	5	5	
		Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa dibagi Jumlah Desa dikali 100%	Laporan		10	10	10	10	
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan / Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Dokumen			2	4	6	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dibagi Jumlah Desa dikali 100 %	Dokumen			2	2	2	

3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kermasyarakatan Desa

Program	Indikator Program (out come)	Kegiatan	Indikator Kegiatan (output)	Formula Indikator	Satuan	Tahun Dasar		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja Akhir Periode Renstra
						Formula	Angka				
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dikali 100%	Persen	2500/3706* 100	67,46	75,55	80,95	100	100
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang Terlibat di Dalam Pemberdayaan Masyarakat dibagi Total Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat dikali 100%	Persen	2500/3706* 100	67,46	75,55	80,95	100	100
		Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	-	-	3	7	12	
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 100 %	Dokumen			10	13	17	21
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dikali 100%	Lembaga			100	120	130	145

1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dibagi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di kali 100 %	Unit			1	1	1	
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dibagi Jumlah Desa X 100%	Laporan			1	2	3	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		8	10	12	14	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga dibagi Total Jumlah PKK dikali 100 %	Dokumen		300	50	100	150	